

## RELASI KUASA PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN BANDARA DHOHO KEDIRI DI DESA GROGOL KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI

<sup>1</sup>Muhammad Rafikhul Ikhsan Eka Putra

<sup>1</sup>Sosiologi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

**Corresponding author:**

Muhammad Rafikhul Ikhsan Eka Putra

[rafiputra100@gmail.com](mailto:rafiputra100@gmail.com)

**Keywords:**

Development; authorization; airport

**DOI:**

<https://doi.org/10.20527/h-js.v3i2.228>

**Article History:**

Received: March 23, 2024

Accepted: April 26, 2024

### ABSTRACT

The development of Kediri Airport is a national strategic project built with the Government and Business Entity Cooperation (GBEC) scheme, the implementation of which is carried out by PT Gudang Garam through its subsidiary, PT Surya Dhoho Investama. This research analyses the problems related to land acquisition for the construction of Dhoho Kediri Airport in Grogol District, Kediri Regency using Michel Foucault's power relations theory. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. This research took place from April 2021 to December 2023. This research found that there are at least 4 parties involved in the land acquisition process, namely: the village and sub-district governments of Grogol, PT Gudang Garam, Tbk, the Kediri District Land Agency and also the people of Grogol Village. The land acquisition process shows that there are discourses from various parties circulating. The actors involved compete with each other to legitimise the existing power. This is in line with Michele Foucault's theory of power relations that power is a dimension of relations. Where relations and power cannot be separated from one another. In the process, 17 families in Grogol Village made demands to the buyer, PT Gudang Garam, through the Kediri District Court. However, the final solution was only a nominal increase in compensation that was not too significant. This happened because of the power relations involved in the land acquisition process. The discourse from the government that the development is useful for the public interest is considered the most efficient. It is very important that in the process of land acquisition for the public interest, the government or the buyer pays more attention to the affected community.

### ABSTRAK

Pembangunan Bandara Kediri merupakan proyek strategis nasional yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUS), yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT Gudang Garam melalui anak perusahaannya yakni PT Surya Dhoho Investama. Penelitian ini menganalisis permasalahan terkait pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Dhoho Kediri di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dengan menggunakan teori relasi kuasa dari Michel Foucault. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berlangsung dari bulan April 2021 hingga Desember 2023. Penelitian ini menemukan bahwa setidaknya ada 4 pihak yang terlibat pada proses pembebasan lahan, yakni: pemerintah Desa dan Kecamatan Grogol, PT. Gudang Garam, Tbk, Badan Pertanahan Kabupaten Kediri dan juga masyarakat Desa Grogol. Proses pembebasan lahan tersebut menunjukkan adanya wacana-wacana dari berbagai pihak yang beredar. Para aktor yang terlibat saling beradu wacana untuk melegitimasi kuasa yang ada. Hal tersebut selaras dengan teori Michele Foucault mengenai relasi kuasa bahwa kekuasaan merupakan suatu dimensi dari relasi. Dimana relasi dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Pada prosesnya sebanyak 17 keluarga di Desa Grogol menyatakan tuntutan kepada pihak pembeli, yaitu PT. Gudang Garam, melalui pengadilan Kabupaten Kediri. Namun solusi akhirnya hanya berupa penambahan nominal ganti rugi yang tidak terlalu signifikan. Hal tersebut terjadi karena adanya relasi kuasa yang terlibat dalam proses pembebasan lahan. Wacana dari pemerintah bahwa pembangunan tersebut berguna untuk kepentingan umum dinilai paling efisien. Sangat penting pada proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum, pihak pemerintah atau pihak pembeli lebih memperhatikan masyarakat yang terdampak.

**How to Cite:**

Putra, M. R. I. E. (2024). Relasi Kuasa Pembebasan Lahan Pembangunan Bandara Dhoho Kediri di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 3(2), 178-190. <https://doi.org/10.20527/h-js.v3i2.228>



This is an open access article under the CC BY-SA license.

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Pembangunan pada awalnya digunakan sebagai tolak ukur dari sebuah pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Suatu masyarakat dianggap berhasil dalam perkembangannya jika pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Jadi yang diukur adalah produktivitas masyarakat dan negara per tahun. Upaya pembangunan pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan nilai dan sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif dalam perihal inovasi dan pembaharuan (Rochajat, 2011).

Sejak tahun 2014, pemerintah banyak membangun infrastruktur dan fasilitas publik yang seiring dengan arah dan tujuan dari program prioritas Nawacita. Nawacita merupakan sembilan program pemerintah yang digagas untuk perubahan menuju Indonesia menjadi negara yang berdaulat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Salah satu program Nawacita tersebut adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Atas dasar tersebut, pemerintah memfokuskan pembangunan pada bidang infrastruktur transportasi massal untuk dapat mempermudah akses tiap daerah yang ada di Indonesia.

Pemerintah Indonesia menetapkan Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Salah satunya adalah pembangunan Bandar Udara Terpadu yang berlokasi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Terpilihnya Kediri sebagai lokasi pembangunan Bandara bertaraf internasional tidak lepas karena andil dari PT. Gudang Garam Tbk yang juga menjadi pelaksana pembangunan Bandar Udara Terpadu Kediri.

Pembangunan Bandara Kediri merupakan proyek strategis nasional yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, pembangunan bandara Kediri dilakukan oleh PT Gudang Garam melalui anak perusahaannya, yaitu PT Surya Dhoho Investama. Sesuai perencanaan, pembangunan Bandara Kediri dibangun di atas lahan seluas 450 hektar dengan fasilitas *runway* atau landasan pacu seluas 3.300 x 45m<sup>2</sup>. Lokasi pembangunannya mencakup 4 desa di 3 kecamatan, yakni Desa Grogol Kecamatan Grogol, Desa Bulusari Kecamatan Tarokan, Desa Tiron dan Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2023). Pembangunan bandara ini dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yakni PT. Gudang Garam sebagai pemilik lahan dan PT. Angkasa Pura sebagai operator bandara atau biasa disebut dengan *Public Private Partnership* (Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2019).

Proses pembangunan Bandara Kediri dimulai pada bulan April 2020 yang ditandai dengan *groundbreaking* atau peletakan batu pertama pada lokasi pembangunan proyek.

Pembangunan Bandara Kediri diperkirakan selesai pada 2023 dan dapat beroperasi secara umum pada bulan Maret 2023. Pada proyek pembangunan bandara ini terdapat permasalahan yang terjadi dalam pembebasan lahan. Masalah pembebasan lahan yang terjadi terkait antara masyarakat dan pemerintah ([Arif, 2020](#)). Konflik sengketa lahan yang terjadi pada pembangunan Bandara Kediri didasari adanya perbedaan pandangan mengenai proses pembebasan lahan di Desa Grogol. Proses pembebasan lahan yang terjadi di Desa Grogol melibatkan beberapa aktor, antara lain: pemerintah, *stakeholder* atau kontraktor, dan para masyarakat Desa Grogol. Para aktor tersebut memiliki pandangan yang berbeda, seperti ganti rugi yang diterima oleh masyarakat, dan juga mengenai adanya perbedaan kepentingan yang terjadi dalam proses pembebasan lahan tersebut.

Teori relasi kuasa Michele Foucault menjelaskan persoalan kekuasaan bukanlah persoalan kepemilikan, dalam konteks siapa menguasai siapa atau siapa yang *powerful* sementara yang lain *powerless*. Kekuasaan itu tersebar, berada dimana-mana (*omnipresent*) dan terdapat dalam setiap relasi sosial ([Kamahi, 2017](#)). Sebagaimana dengan adanya pembangunan Bandara Dhoho di Kediri, perencanaannya tidak hanya melibatkan kuasa pemerintah saja. Melainkan memerlukan kuasa dari pihak kontraktor, pihak investor, bahkan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Secara implisit, Foucault sebenarnya ingin mengatakan bahwa bentuk dari kekuasaan adalah berupa rezim wacana. Wacana tersebut dapat berwujud sebagai praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan, yang mengubah konstelasi sosial dan yang menghasilkan, dan wacana sebagai yang memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan ([Sholikhah, 2020](#)). Hal tersebut selaras dengan proses pembebasan lahan di Desa Grogol yang terdapat wacana-wacana yang beredar. Para aktor yang terlibat saling beradu wacana untuk melegitimasi kuasa yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wacana yang beredar selama proses pembebasan lahan yang dilakukan PT. Surya Dhoho Investama dan melihat peran para aktor yang terlibat. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa praktek relasi kuasa yang beredar di masyarakat masih belum berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh michele Foucault. Masih banyak masyarakat kelas bawah yang menjadi korban dari pihak yang memiliki relasi kuasa yang dinilai lebih tinggi.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian studi kasus, untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap kejadian, proses dan aktivitas, yang terjadi di lokasi penelitian ([Sugiyono, 2017](#)). Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021 – Desember 2023 di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Data didapatkan dari sumber primer dan sekunder ([Sugiyono, 2017](#)). Pengumpulan data dilakukan melalui: observasi secara langsung dalam proyek pembangunan bandara; menggali informasi dengan cara wawancara mendalam kepada informan, yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah Desa Grogol, pemerintah Kecamatan Grogol dan Dinas Pertanahan Kabupaten Kediri; serta, dokumentasi sebagai pendukung temuan data di lapangan. Pada penelitian kali ini menggunakan teknik analisa data berdasarkan skema dari ([Miles & Huberman, 2014](#)), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi sumber.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Lokasi Penelitian

Kecamatan Grogol merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, yang memiliki luas wilayah 35 kilometer persegi. Kecamatan Grogol memiliki 9 Desa/Kelurahan yang terbagi menjadi 39 dusun/dukuhan. Secara geografis Kecamatan Grogol berbatasan langsung dengan: Kecamatan Tarokan di bagian utara; Kecamatan Banyakan di bagian selatan; dan, di bagian timur dan barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Grogol bekerja sebagai petani padi.

### 2. Kekuasaan dalam Pembangunan Bandara Dhoho Kediri

Kekuasaan menurut Foucault tidak hanya berasal dari pemerintah saja, melainkan setiap orang tidak akan terlepas dari kuasa itu sendiri. Secara general memang Foucault menyatakan adanya kekuasaan disiplin dan kekuasaan kedaulatan yang dimiliki oleh struktur dan pemerintah negara. Namun lebih jauh dari itu, Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan dapat dimaknai lebih dan tidak dapat terus dijalankan atau bergerak dengan adanya relasi yang terus bergerak pula ([Kamahi, 2017](#)). Sebagaimana dengan adanya pembangunan Bandara Dhoho di Kediri, perencanaannya tidak hanya melibatkan kuasa pemerintah saja. Melainkan memerlukan kuasa dari pihak kontraktor, pihak investor, bahkan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Masyarakat yang awalnya merupakan pemilik lahan memiliki kuasa untuk memilih menjual atau mempertahankan lahannya. Namun ketika sebagian besar masyarakat melepas lahannya dan menerima biaya ganti lahannya, pada akhirnya pihak yang kurang berkenan ikut serta melepas lahannya untuk dijual ke pihak swasta. Pihak Swasta juga memiliki kuasa untuk menjadikan lahan yang telah dibeli sebagai lahan pabrik atau bangunan yang lain. Namun dengan adanya relasi kuasanya dengan pihak pemerintah, tentu antara satu pihak dengan yang lain akan mempertimbangkan keuntungan yang ditawarkan dari adanya kesepakatan akhir.

Kekuasaan bukanlah institusi atau struktur, atau kekuasaan properti, tetapi kekuasaan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi strategis yang kompleks dalam masyarakat ([Cronin, 1996](#); [Mudhoffir, 2013](#)). Misalnya situasi strategis dengan adanya perencanaan pembangunan Bandara Dhoho Kediri, baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat mendapatkan pilihan dalam kuasanya untuk dapat menolak, menerima atau menyepakati sesuatu yang menguntungkan dalam proses perencanaan pembangunan Bandara Dhoho Kediri. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa kekuasaan tentu lekat dengan adanya pengetahuan. Bagi pihak yang mengetahui informasi sebagai pengetahuan yang lebih dibandingkan yang lain tentu akan mendapatkan kekuasaan yang lebih pula. Adapun peran relasi yang dimiliki juga menjadi salah satu faktor penting lainnya ([Cronin, 1996](#); [Mudhoffir, 2013](#)). menunjukkan konsep kekuasaan sebelumnya yang pada dasarnya dianggap terkait dengan dijalankan oleh dan melawan para aktor dalam konsep kekuasaan relasional yang didasarkan pada jaringan hubungan antar subjek.

Pembangunan Bandara Dhoho Kediri ini lebih berfokus pada *sovereign power* atau kekuasaan berkedaulatan hukum. Seharusnya dapat diterapkan *disciplinary power* yang dapat menempatkan masyarakat pemilik lahan sebagai bentuk tubuh yang mampu

menormalisasi kekuasaan. Namun pada pelaksanaannya, hubungan antara kuasa yang paling kuat dan mampu membentuk sistem atas suatu hubungan mampu mengisolasi suatu pihak dari suatu hubungan kekuasaan sehingga terdapat strategi kuasa yang membuat hubungan kekuasaan menjadi lebih efisien.

Kekuasaan yang tidak lepas dengan adanya pengetahuan juga penulis temui dengan adanya pemanfaatan relasi masyarakat dengan pemerintah, dan pemerintah dengan pihak swasta yaitu PT. Gudang Garam. Masyarakat mendapatkan pelatihan untuk menjadi pegawai atau karyawan di bidang jasa angkut barang (kargo) dan juga jasa pelayanan, seperti satpam atau pramugari di Bandara Dhoho Kediri nantinya. Serta pelatihan untuk industri kreatif agar dapat menarik minat wisatawan yang datang dari Bandara Dhoho Kediri. Masyarakat diberikan pelatihan untuk dapat menggantikan profesi yang awalnya petani menjadi pekerja atau pegawai di Bandara Dhoho Kediri.

### 3. Relasi Kuasa

Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault yang merupakan seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan suatu dimensi dari relasi. Relasi dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Namun, yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini ([Kamahi, 2017](#)).

Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Foucault memiliki sudut pandang yang berbeda tentang cara memahami kekuasaan. Cara Foucault memahami kekuasaan sangat orisinal. Menurut Foucault, kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil. Karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan sosial ([Cronin, 1996](#); [Mudhoffir, 2013](#)).

Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hierarkis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif. Setiap pihak memiliki kuasa untuk menentukan suatu keputusan, namun dengan adanya relasi yang bersifat intensional maka pihak yang memiliki pengetahuan terbatas dan hubungan yang kurang intensional dibandingkan dengan pihak yang lain akan mendapatkan keputusan yang kurang menguntungkan. Oleh karena itulah Foucault menyatakan bahwa relasi kuasa adalah strategi mencapai pemanfaatan kekuasaan yang lebih efisien ([Cronin, 1996](#); [Mudhoffir, 2013](#)).

Relasi kekuasaan yang terjadi pada proses pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Dhoho di Desa Grogol melibatkan 4 aktor, yakni: PT. Gudang Garam, Tbk; Pemerintah Desa dan Kecamatan Grogol; Dinas Pertanahan Kabupaten Kediri; dan, Masyarakat terdampak pembebasan lahan. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembebasan lahan tersebut memiliki peran dan wacana yang berbeda-beda.

#### 4. Wacana Para Aktor Dalam Proses Pembebasan Lahan

##### a. Wacana PT. Gudang Garam, Tbk.

Dalam konteks proyek pembangunan Bandara Dhoho Kediri, PT. Gudang Garam menggunakan strategi pewacanaan “ganti untung” dan “Persuasif” untuk membentuk opini publik dan melegitimasi pembangunan ([Abu, 2020](#)). Meskipun narasi nasionalisme dan dampak positif ekonomi ditekankan, tetapi ada kompleksitas dan ketidaksetaraan dampak yang perlu diperhatikan. Peran pemerintah, perusahaan swasta, kontraktor, dan masyarakat sangat krusial untuk memastikan implementasi strategi pembebasan lahan yang adil dan berkelanjutan. Pemahaman landasan hukum yang kuat juga menjadi dasar penting dalam proses pembebasan lahan. Evaluasi dan perbaikan terus menerus harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

##### 1) *Ganti untung*

Pada strategi pewacanaan “ganti untung”, PT. Gudang Garam menekankan aspek nasionalisme dan pengorbanan untuk negara. Dalam wawancara dengan Bapak Sapto Warsih selaku Sekretaris Pelaksana Pengadaan Pembebasan Lahan Bandara Kediri di Kecamatan Grogol, terungkap bahwa masyarakat diinformasikan tentang pentingnya proyek ini untuk kemajuan negara. Strategi ini memberikan efek kuat dan stigmatik terhadap pihak yang menolak pembangunan, dengan menuduh mereka tidak nasionalis dan melawan negara.

Namun, dampak strategi ini juga terlihat dalam ketidakpuasan beberapa warga terdampak yang merasa ganti untung yang diberikan tidak adil. Wacana nasionalisme yang digunakan PT. Gudang Garam dapat dianggap sebagai nasionalisme semu, Nasionalisme semu di sini yang dimaksud adalah nasionalisme yang tidak dilandasi karena kecintaannya pada negeri ini secara sungguh-sungguh. Mereka mencintai negeri ini karena ada kepentingan dibalikinya ([Sahide, 2016](#)).

##### 2) *Persuasif*

Dalam strategi “persuasif”, PT. Gudang Garam menggunakan argumen ekonomi dan sosial. Mereka menciptakan narasi bahwa pembangunan Bandara Dhoho Kediri memberikan dampak positif pada perubahan sosial dan ekonomi di wilayah sekitarnya. Harga tanah yang meningkat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peluang investasi adalah poin-poin yang digunakan untuk meyakinkan masyarakat.

Namun, pemahaman yang lebih dalam menunjukkan adanya dampak tidak merata, di mana sebagian masyarakat mendapatkan manfaat, tetapi ada juga yang masih berpenghasilan pas-pasan. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan warga yang tidak merasakan dampak positif secara langsung.

##### b. Wacana Pemerintah

Analisis dan pembahasan berdasarkan teori Foucault dapat dilakukan dengan melihat bagaimana kekuasaan (power) dan pengetahuan (knowledge) dijalankan dalam konteks wacana pemerintah terkait ganti untung dan persuasif dalam pembangunan Bandara

Dhoho Kediri. Teori Foucault menyoroti bagaimana kekuasaan dihasilkan dan dipertahankan melalui praktik-praktik diskursif ([Kamahi, 2017](#)).

#### 1) *Ganti untung*

Wacana “ganti untung” dalam konteks pembebasan lahan Bandara Dhoho Kediri mencerminkan bagaimana kekuasaan dijalankan, dan perspektif Michel Foucault memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika ini. Foucault melihat kekuasaan tidak hanya sebagai milik entitas tertentu, tetapi tersebar di seluruh struktur sosial ([Cronin, 1996](#); [Mudhoffir, 2013](#)). Dalam analisis ini, peran pemerintah sebagai agen kekuasaan menggunakan wacana ganti untung sebagai alat untuk melegitimasi pembebasan lahan.

Dalam pandangan Foucault, wacana menciptakan realitas sosial ([Cronin, 1996](#); [Mudhoffir, 2013](#)). Pemerintah, sebagai agen kekuasaan, menekankan ide nasionalisme dan pengorbanan demi negara. Melalui konsep “ganti untung” tindakan pembebasan lahan diposisikan sebagai suatu yang dilakukan demi kepentingan umum dan negara. Namun, di balik retorika ini, terjadi ketidaksetaraan antara pihak yang mendukung dan menolak pembangunan, menciptakan dinamika kekuasaan yang merugikan kelompok yang terdampak.

Foucault menekankan bahwa teks-teks seperti berita dan pernyataan pemerintah merupakan tempat di mana kekuasaan dijalankan ([Chusna, 2019](#)). Wacana “pengorbanan besar dari semua pihak” menciptakan norma sosial yang harus diikuti. Bagi mereka yang menolak ganti untung, stigma dipasang sebagai tidak nasionalis atau tidak mau berkorban untuk pembangunan. Dengan demikian, wacana menjadi alat untuk menentukan siapa yang berada dalam batas norma dan siapa yang dianggap sebagai pihak yang merugikan kepentingan umum.

Dalam menjalankan kekuasaan, pemerintah memainkan peran sentral dalam mengelola proses pembebasan lahan. Dengan kendali penuh atas proses ini, mereka menjadi penentu bagaimana kepentingan umum diinterpretasikan dan dijalankan. Pendekatan individu, regulasi, dan peran aktor masyarakat mencerminkan struktur kekuasaan yang diterapkan pada berbagai tingkatan. Dalam teori Foucault, birokrasi dan regulasi menjadi alat utama pemerintah dalam menjalankan kekuasaan.

Teori Foucault juga menyoroti peran birokrasi dan regulasi sebagai alat utama kekuasaan ([Cronin, 1996](#); [Mudhoffir, 2013](#)). Pemerintah, perusahaan swasta, dan kontraktor membentuk suatu jaringan kekuasaan yang menentukan pembebasan lahan. Warga masyarakat sebagai pemilik lahan berhadapan dengan praktik-praktik kekuasaan ini. Dalam upaya resistensi, mereka dapat menggunakan strategi organisasi masyarakat atau pendampingan hukum sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang ada.

Dengan menggunakan kerangka teori Foucault, analisis terhadap wacana pemerintah dalam konteks ganti untung lahan masyarakat menjadi lebih kompleks dan memberikan wawasan yang mendalam terkait dinamika kekuasaan dalam proses pembebasan lahan.

#### 2) *Persuasif (kepentingan umum)*

Dalam menganalisis aspek “persuasif”, pemerintah sebagai aktor menekankan istilah “kepentingan umum” teori Foucault dapat membantu kita memahami bagaimana pemerintah menggunakan wacana sebagai alat legitimasi dan pengendalian. Konsep

“kepentingan umum” diarahkan untuk mendukung tindakan pemerintah, mengesampingkan keberagaman pandangan dan membenarkan pembebasan lahan. Pemerintah menggunakan retorika persuasif dengan merujuk pada konsep “kepentingan umum” sebagai strategi utama untuk memperoleh dukungan masyarakat (Abu, 2020). Analisis ini akan mengungkap bagaimana pemerintah memanfaatkan kekuasaannya dalam membentuk pengetahuan dan pandangan publik terkait pembangunan bandara.

Perspektif Michel Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan akan diaplikasikan untuk memahami bagaimana wacana ini digunakan untuk memperkuat legitimasi pemerintah dan meredam suara kritis dari masyarakat. Pemerintah menggunakan konsep “kepentingan umum” sebagai dasar hukum untuk pembebasan lahan (Abu, 2020). Dalam pandangan Foucault, konsep ini mencerminkan bagaimana pengetahuan (dalam hal ini, pemahaman kepentingan umum) digunakan sebagai alat kekuasaan untuk melegitimasi tindakan pemerintah.

Dengan merinci dan mendefinisikan kepentingan umum, pemerintah menciptakan narasi yang membenarkan pembebasan lahan dan pembangunan bandara sebagai suatu keharusan untuk kemajuan Bersama (Pelaksana BPK JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 2020). Dalam konteks persuasif, wacana kepentingan umum digunakan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan Bandara Dhoho Kediri adalah suatu kebutuhan untuk perkembangan nasional. Pemerintah menggunakan konsep nasionalisme semu untuk memanipulasi persepsi masyarakat, sehingga mereka yang menolak atau kritis terhadap pembangunan tersebut dapat dianggap sebagai “melawan negara”.

Dalam teori Foucault, pengetahuan dan kekuasaan saling terkait. Wacana kepentingan umum menciptakan pengetahuan yang mengonstruksi realitas pembangunan sebagai suatu keharusan. Oleh karena itu, masyarakat yang menolak pembangunan tersebut dianggap melawan realitas yang dibangun dan dapat menghadapi tindakan represif oleh negara.

### 3) Legitimasi media massa

Media komunikasi termasuk didalamnya media massa sebagai perantara dalam penyampaian informasi. Media massa meliputi media cetak, media elektronik dan media online (Nur, 2021). Salah satu alat pemberitaan terpenting dalam memberitakan suatu peristiwa adalah media massa baik cetak maupun elektronik. Lewat pemberitaan yang terus menerus disebarkan, media secara langsung membentuk pemahaman dan kekuasaan di kepala khlayak mengenai sesuatu. Wacana yang dibuat oleh media itu bisa jadi melegitimasi suatu hal atau kelompok dan medelegitimasi dan memarjinalkan kelompok lain (Sari, 2019).

Pada Kasus pembebasan lahan di desa grogol peranan media masa dalam menyampaikan berita sangat masif. Pada khususnya pemberitaan yang bersumber dari pemerintah. Pemerintah memanfaatkan media massa sebagai sarana untuk menyebarkan wacana dalam proses pembebasan lahan di desa grogol. Melalui pemberitaan media massa, pemerintah melegitimasi bahwa pembangunan bandara tersebut berguna untuk kemajuan daerah Kediri dan tidak merugikan masyarakat (Chusna, 2019).

Bentuk dari legitimasi yang dilakukan pemerintah melalui media massa adalah mengikutsertakannya media massa untuk meliput proses pembangunan bandara dan

menyebarkan berita positif tentang dampak kedepannya. Seperti dikutip dari laman berita online Surya.co.id yang berjudul “Bandara Segera Beroperasi, Bupati Mas Dhito Harap Kediri Jadi Episentrum Baru Jawa” ([Husnika, 2022](#)) menjelaskan bahwa pemerintah sedang membangun legitimasi kepada masyarakat mengenai dampak positif dari pembangunan Bandara Dhoho.

### c. Wacana Masyarakat

Pembangunan Bandara Dhoho Kediri tentu berdampak secara langsung dan tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten yang merupakan daerah terdampak langsung dengan adanya pembangunan bandara tersebut. Masyarakat sebagai pemilik lahan yang akan dibebaskan, warga memiliki hak dan kepentingan dalam proses ini. Mereka perlu berpartisipasi dalam negosiasi kompensasi dan mengekspresikan kekhawatiran mereka terkait pemindahan tersebut.

Proses pembebasan lahan yang terjadi di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat yang menerima dengan masyarakat yang menolak tentang pembebasan lahan tersebut.

#### 1) Wacana masyarakat yang menolak

##### a) Wacana tanah leluhur

Wacana yang berkembang di kalangan masyarakat yang menolak pembangunan Bandara Dhoho Kediri menyoroti ketidaksetujuan mereka terhadap penggunaan tanah leluhur untuk proyek ini.

*“...Tanah ini adalah warisan leluhur kami, di sini terdapat makam-makam mereka. Kami tidak bisa dengan mudah melepaskan tanah yang memiliki nilai sejarah dan spiritual begitu besar bagi kami. Ganti rugi yang mereka tawarkan tidak sebanding dengan nilai itu...”*  
(Informan Slamet (pemimpin adat Desa Grogol), 2023)

Sebagian dari warga Desa Grogol merasa bahwa tanah yang dihuni dan diwariskan oleh leluhur mereka memiliki nilai spiritual dan historis yang tidak bisa diukur dengan ganti rugi yang ditawarkan. Wacana ini menciptakan fondasi bagi penolakan dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Tanah dianggap sebagai bagian integral dari identitas dan warisan budaya masyarakat, sehingga langkah-langkah untuk melibatkan hukum dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut.

Dalam konteks ini, teori Foucault menggarisbawahi bahwa pengetahuan dan wacana tidak hanya mencerminkan kebenaran, tetapi juga merupakan alat kekuasaan ([Cronin, 1996](#); [Mudhoffir, 2013](#)). Wacana mengenai tanah leluhur dapat diinterpretasikan sebagai resistensi terhadap pembentukan pengetahuan yang diarahkan oleh pemerintah. Masyarakat mencoba mengontrol narasi mengenai tanah leluhur mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik-praktik kekuasaan yang mungkin merugikan mereka.

##### b) Ganti rugi tidak sepadaan

Selain masalah tanah leluhur, wacana masyarakat yang menolak juga menyoroti ketidaksetujuan terhadap skema ganti rugi yang dianggap tidak sesuai. Sejumlah warga

menilai bahwa kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari tanah dan aset yang akan mereka lepaskan.

*“...Pemerintah harus menghargai warisan leluhur kami. Kami bersama-sama mengajukan gugatan ke pengadilan agar suara kami didengar dan hak-hak kami dilindungi...” (Informan Siti Rahayu, 2023)*

Keterangan informan Siti Rahayu di atas, sebagai tokoh masyarakat setempat, mencerminkan ketidakpuasan terhadap kesepakatan ganti rugi yang dinilai tidak adil. Proses perundingan dan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat tidak mencapai titik kesepakatan yang memuaskan, sehingga masyarakat merasa perlu untuk mengambil langkah hukum sebagai bentuk perlawanan.

Teori Foucault menunjukkan bahwa resistensi masyarakat dapat memengaruhi dinamika kekuasaan ([Kamahi, 2017](#)). Dalam kasus ini, masyarakat yang menolak membentuk wacana yang menantang norma-norma yang diterapkan oleh pemerintah. Gugatan hukum dianggap sebagai strategi perlawanan untuk memodifikasi praktik-praktik kekuasaan yang dinilai merugikan masyarakat.

## 2) Wacana masyarakat yang menerima

Dalam mengeksplorasi wacana masyarakat yang menerima pembangunan Bandara Dhoho Kediri, dapat diamati bahwa mayoritas warga menunjukkan sikap pasif terhadap keputusan pemerintah. Penerimaan ini diartikulasikan sebagai suatu keharusan yang diarahkan oleh pemerintah pusat, dan wacana yang mendominasi menunjukkan ketidakaktifan dan penerimaan akan keputusan ini.

*“...Ya memang, awalnya banyak yang tidak terima karena tidak tahu bagaimana proyek ini akan berjalan. Tapi setelah beberapa kali pertemuan dengan pihak pengembang dan pemerintah, akhirnya banyak yang menerima karena dijelaskan bahwa ini untuk kemajuan Negara...” (Informan Siti Rahayu, 2023)*

Dari kutipan wawancara di atas terungkap bahwa setelah beberapa kali pertemuan dengan pihak pengembang dan pemerintah, banyak yang menerima pembangunan tersebut karena diyakinkan bahwa ini untuk kemajuan negara. Wacana pasif ini mencerminkan dominasi kekuasaan pemerintah dalam membentuk pandangan masyarakat. Keterbatasan informasi dan pemahaman awal masyarakat terkait proyek tampaknya memainkan peran kunci dalam munculnya wacana ini. Masyarakat menerima pembangunan bandara sebagai suatu keniscayaan yang mendukung kepentingan nasional, dan pemahaman mereka terkait proyek ini menjadi faktor penentu dalam terbentuknya wacana pasif.

Dalam kerangka teori Foucault, pandangan pasif ini dapat dianggap sebagai hasil dari dinamika kuasa yang terjadi dalam masyarakat. Kekuasaan tidak hanya dilihat sebagai alat represif, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan pengetahuan dan wacana ([Kamahi, 2017](#)). Dengan informasi yang terbatas, masyarakat menerima pandangan yang telah dibentuk oleh pemerintah, mengakibatkan terbentuknya wacana pasif.

Namun, walaupun mayoritas warga tampak menerima pembangunan ini, perlu dicermati apakah pandangan ini benar-benar mencerminkan keyakinan otentik masyarakat atau apakah dipengaruhi oleh upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau kontraktor. Teori Foucault menyoroti bahwa kuasa dapat beroperasi

melalui pembentukan pengetahuan dan wacana, sehingga relevan untuk menilai sejauh mana pandangan positif ini muncul sebagai respons organik atau hasil dari pengaruh eksternal ([Kamahi, 2017](#)).

Dengan demikian, analisis wacana masyarakat yang menerima pembangunan Bandara Dhoho Kediri menunjukkan kompleksitas dalam hubungan antara kuasa dan pandangan masyarakat. Sikap pasif mayoritas warga mencerminkan interplay antara keterbatasan informasi, dominasi kekuasaan pemerintah, dan mekanisme pembentukan wacana.

## 5. Resistensi dalam Pembangunan Bandara Dhoho Kediri

Foucault juga telah mengatakan bahwa keberadaan kuasa tentu tidak akan terlepas dari anti kuasa (resistensi). Perlawanan tidak berada di luar relasi kuasa, setiap orang berada di dalam relasi kuasa, tidak ada satu jalanpun untuk keluar darinya. Dengan kata lain, bila ada satu hubungan relasi kuasa di ranah tertentu, maka disitulah kekuasaan sedang berjalan, dan akan selalu ada yang menentang kekuasaan tersebut ([Sholikhah, 2020](#)). Misalnya dalam pembangunan Bandara Dhoho di Kediri yang memerlukan ratusan hektar lahan yang awalnya merupakan lahan pertanian masyarakat dan menjadi sumber penghasilan masyarakat. Ketika terdapat masyarakat yang merasa mendapat kompensasi yang kurang sesuai, tentu mereka akan mengajukan penolakan.

Masyarakat yang melakukan penolakan karena merasa biaya ganti lahannya kurang sesuai sempat mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun pihak desa mengaku hanya menampung keluhan dan merasa tidak berkaitan dengan pengajuan tuntutan ke pengadilan. Beliau juga menjelaskan bahwa sempat ada masyarakat yang mengeluh akibat kebisingan dari pembangunan bandara. Setelah disampaikan kepada pihak pengembang atau kontraktor pembangunan akhirnya pembangunan diberhentikan setiap jam 23.00 WIB dan masyarakat diberikan kompensasi berupa sembako dari pihak swasta.

*“...Kami selaku pemerintah memberikan tempat untuk berdiskusi dan menemukan jalan keluar yang baik. Kemarin juga ada masalah mengenai makam di lokasi yang dibangun bandara, tapi untungnya juga pihak pengembang mau mendesain bangunan agar makam yang ada tidak digusur...” (Informan Agus Sujarwo, 2022)*

Kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat juga mengajukan penolakan akibat lokasi pembangunan bandara yang hampir menggunakan lahan makam. Namun setelah dikomunikasikan dengan pihak swasta yaitu PT. Gudang Garam melalui kontraktor atau pengembangnya. Pada akhirnya pembangunan bandara digeser sehingga tidak sampai menggunakan lahan area makam masyarakat.

*“...Kami melakukan musyawarah sampai 3 kali, namun tidak ada kesepakatan. Akhirnya diajukan gugatan kepada BPN dan PT. Gudang Garam, Tbk ...” (Informan Sapto Warsih, 2023)*

Kutipan wawancara di atas menjelaskan posisi BPN pada saat adanya gugatan warga terkait pembebasan lahan bandara Kediri adalah sebagai pihak yang tergugat. Dengan merasa keberatan atas ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Peranan lain yang dilaksanakan oleh BPN adalah sebagai pihak yang berwenang memberikan sertifikat lahan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan bandara. Dalam permasalahan administrasi tersebut, BPN melakukan pelepasan sertifikat dari pemilik lahan sebelumnya menjadi lahan milik negara. BPN juga memastikan bahwa saat ini proses pembangunan bandara Dhoho sudah berjalan dan terus dikebut pembangunannya.

Resistensi atau penolakan masyarakat terhadap pembebasan lahan tersebut sudah terselesaikan. Akan tetapi, dalam proses pembebasan lahan yang terjadi memunculkan putusan bahwa wacana dan kuasa yang terdapat dari para aktor menentukan arah mana yang akan dicapai. Dalam hal ini masyarakat yang menolak harus merelakan lahan pribadi mereka diserahkan kepada pemerintah yang memiliki wacana dan kuasa yang kuat dan relevan. Hal tersebut selaras dengan Teori Foucault yang menyoroti peran birokrasi dan regulasi sebagai alat utama kekuasaan (Cronin, 1996; Mudhoffir, 2013). Pemerintah, perusahaan swasta, dan kontraktor membentuk suatu jaringan kekuasaan yang menentukan pembebasan lahan. Warga masyarakat sebagai pemilik lahan berhadapan dengan praktik-praktik kekuasaan ini. Dalam upaya resistensi, mereka dapat menggunakan strategi organisasi masyarakat atau pendampingan hukum sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang ada.

Dengan menggunakan kerangka teori Foucault, analisis terhadap wacana pemerintah dalam konteks ganti untung lahan masyarakat menjadi lebih kompleks dan memberikan wawasan yang mendalam terkait dinamika kekuasaan dalam proses pembebasan lahan.

#### D. KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan Bandara Dhoho di Kediri tidak hanya melibatkan kuasa pemerintah saja. Melainkan memerlukan kuasa dari pihak kontraktor, pihak investor, bahkan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Masyarakat yang awalnya merupakan pemilik lahan memiliki kuasa untuk memilih menjual atau mempertahankan lahannya. Pihak Swasta juga memiliki kuasa untuk menjadikan lahan yang telah dibeli sebagai lahan pabrik atau bangunan yang lain. Namun dengan adanya relasi kuasanya dengan pihak pemerintah, tentu antara satu pihak dengan yang lain akan mempertimbangkan keuntungan yang ditawarkan dari adanya kesepakatan akhir. Penulis menyarankan kepada pemerintah selaku aktor sentral atau penengah dari setiap proses pembangunan untuk lebih berperan aktif ke dalam masyarakat dan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Terlihat bahwa dalam kasus ini pemerintah kurang aktif dalam proses penegakan keadilan, seharusnya pemerintah lebih proaktif kepada masyarakat, tidak hanya bertindak apabila terdapat laporan dari masyarakat.

#### REFERENSI

- Abu, R. (2020). Strategi Institusional Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *Amanna Gappa*, 28(1), 12-20. <https://doi.org/10.20956/ag.v28i1.9697>
- Arif, S. (2020). Warga Kediri Tolak Pembebasan Lahan Bandara Gudang Garam. *Sindonews.com*. <https://daerah.sindonews.com/artikel/jatim/20290/warga-kediri-tolak-pembebasan-lahan-bandara-gudang-garam>
- Chusna, A. (2019). Pembangunan Bandara Kediri dan Harapan Rakyat Pemilik Tanah. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/1040390/pembangunan-bandara-kediri-dan-harapan-rakyat-pemilik-tanah>

- Cronin, C. (1996). Bourdieu and Foucault on Power and Modernity. *Sage Journals*, 22(1), 55-58. <https://doi.org/10.1177/019145379602200603>
- Husnika, L. (2022). Bandara Segera Beroperasi, Bupati Mas Dhito Harap Kediri Jadi Episentrum Baru Jawa Timur. *Surya.co.id*. <https://surabaya.tribunnews.com/2022/07/20/bandara-segera-beroperasi-bupati-mas-dhito-harap-kediri-jadi-episentrum-baru-jawa-timur>
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(1), 117-133. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2926>
- Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. (2019). *Menko Luhut: Bandara Kediri Adalah Proyek Strategis Nasional*, untuk Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. <https://maritim.go.id/detail/menko-luhut-bandara-kediri-adalah-proyek-strategis-nasional>
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023). *Menhub Upayakan Ada Penerbangan Umroh Tahun Depan*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. <https://dephub.go.id/post/read/menhub-upayakan-ada-penerbangan-umroh-tahun-depan>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Los Angeles: Sage Publication.
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 18(1), 1-26. <https://doi.org/10.7454/MJS.v18i1.1253>
- Nur, E. (2021). Peran Media Massa dalam Menghadapi Serbuan Media Online. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(1), 51-64. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/4198>
- Pelaksana BPK JDIIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Tulisan Hukum*. Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pengadaan-tanah.pdf>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Rochajat, A. E. (2011). *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sahide, D. A. (2016). *Nasionalisme Semu*. Edunews.id: <https://edunews.id/ahmad-sahide/nasionalisme-semu/>
- Sari, S. P. (2019). Analisis Wacana Kritis pada Berita Kriminal Surat Kabar Posmetro Padang. *Majalah Ilmiah: UPI YPTK*, 25(2), 124-126. <https://doi.org/10.35134/jmi.v25i2.11>
- Sholikhah, A. (2020). Relasi dan Resistensi Kuasa dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: *Kajian Kekuasaan. Bapala*, 7(3), 3-6. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/34714>
- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia: Jurnal of Arts Research and Education*, 11(2) 173-179. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.